DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Effendi Paringin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1996

Yan Pramadnya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977

A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999

Effendi Perangin, *Peraktek Permohonan Hak atas Tanah*, Rajawali, Jakarta, 1991

Sudargo Gautama dan Ellyda T. Soetiyarto, *Komentar atas Peraturan-peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (1996)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, N. V. Masa Baru, Bandung, 1962

Suyud Margono, *Alternative Dispure Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Alumni, Jakarta, 1991

Howard Raiffa, *The Art & Science of Negotiation*, American Management Association, Amacom, 1982

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* , Alumni, Bandung, 1977

Jan Rummellink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal KUHP Belanda dan Pandangannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Retnowulan Sutanto, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997

Leonard L. Riskin can James E Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyer*, West Publishing & Co, 1987

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Alumni, Jakarta, 1991

Arie S Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, LPHI, Jakarta, 2005

I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan Mediasi Dalam sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

B. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1961

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tanggal 9 November 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelola Sumber Daya Alam

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

HIR

RGB

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi

Peraturan Mentri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Tahapan Mediasi

C. Situs :

www.bpn.go.id

www.tripod.com

www.makalahdanskripsi.blogspot.com

www.hukumonline.com

D. Lain-lain:

Maria SW Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, cet. 2, Kompas, Jakarta, 2008, Hlm.7

E. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dari Kepala Sub. Seksi Sengketa Kabupaten Majalengka bernama Awaludin, hari Senin tanggal 4 November 2013 pkl. 19.47 WIB

Hasil wawancara dari Kepala Sub. Seksi Sengketa bernama Eddy Sofyan, hari Senin tanggal 4 November 2013 pkl. 10.24 WIB